



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN NATUNA**

## KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD

Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ranai, 23 Agustus 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



**PURYANTI, SP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
	1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU.....</b>	<b>8</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	16
	2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	18
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>20</b>
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
	3.2 Tujuan dan Sasaran.....	25
	3.3 Program dan Kegiatan.....	17
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANAGKAT DAERAH.....</b>	<b>30</b>
	4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	30
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>44</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.;

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Dinas Sosial memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Sosial Mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

### **1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Persiapan Penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

### **2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah**

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial meliputi:

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Dinas Sosial mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;

- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

### **3. Forum Perangkat Daerah**

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Sosial dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

### **4. Penetapan Renja SKPD**

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Sosial yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Renja Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Sosial, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2020 - 2024. Renja Dinas Sosial selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61

Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);

17. Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 70);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2023 sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Sosial ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **2. Tujuan**

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Sosial ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2023;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2023 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023
- Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Dinas Sosial Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp.7.574.261.735,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.519.786.528,00 atau sebesar 86,08%, dan realisasi fisik sebesar 100%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**b. Program Pemberdayaan Sosial**

- 1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

**c. Program Rehabilitasi Sosial**

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
  - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
  - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
  - Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

**d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- 1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

**e. Program Penanganan Bencana**

- 1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

## **f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

1) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional  
Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional  
Kabupaten/Kota

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial. Capaian Renstra secara umum telah berjalan dengan baik, dengan capaian pada seluruh kegiatan telah mencapai 100 persen, bahkan sebagian diantaranya telah melebihi target kinerja maupun anggaran yang direncanakan dalam Renstra.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2023 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2022 terlihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2021 dan 2022**

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah				
					5		6		7		I		II		III		IV		9 = 8		10=9/7*100			11=6+9		12=11/5x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
<b>1</b>		<b>URUSAN WAJIB</b>																									
<b>1.06.</b>		<b>SOSIAL</b>			<b>5,868,500,571</b>			<b>5,464,843,306</b>	<b>739,797,609</b>		<b>2,911,896,246</b>	<b>3,832,658,166</b>		<b>5,372,193,379</b>	<b>5,372,193,379</b>									<b>Dinas Sosial</b>			
<b>1.06.01</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Predikat/Nilai Akuntabilitas</b>	<b>BB</b>	<b>76</b>	<b>3,299,100,571</b>		<b>76</b>	<b>3,529,881,456</b>	<b>78.28</b>	<b>701,094,609</b>	<b>78.28</b>	<b>1,664,797,478</b>	<b>78.28</b>	<b>2,557,405,598</b>		<b>3,475,259,316</b>	<b>78.28</b>	<b>3,475,259,316</b>	<b>103</b>	<b>98.45</b>	<b>78.28</b>	<b>3,475,259,316</b>	<b>103</b>	<b>105.34</b>	<b>Dinas Sosial</b>	
<b>1.06.01.2</b>	<b>.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Predikat/Nilai Akuntabilitas</b>	<b>BB</b>	<b>76</b>	<b>75,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>31,180,000</b>	<b>78.28</b>	<b>7,500,000</b>	<b>78.28</b>	<b>13,500,000</b>	<b>78.28</b>	<b>28,579,800</b>	<b>78.28</b>	<b>30,579,800</b>	<b>78.28</b>	<b>30,579,800</b>	<b>103</b>	<b>98.08</b>	<b>78.28</b>	<b>30,579,800</b>	<b>103</b>	<b>40.77307</b>	<b>Dinas Sosial</b>
1.06.01.2	01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan khtsar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	Laporan	2	75,000,000	0	-	2	31,180,000	2	7,500,000	2	13,500,000	2	28,579,800	2	30,579,800	2	30,579,800	100	98.08	2	30,579,800	100	40.773067	Dinas Sosial
<b>1.06.01.2</b>	<b>.02</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>24</b>	<b>2,233,100,571</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	<b>2,956,619,032</b>	<b>3</b>	<b>607,764,769</b>	<b>6</b>	<b>1,433,797,790</b>	<b>9</b>	<b>2,192,020,460</b>	<b>12</b>	<b>2,924,671,438</b>	<b>12</b>	<b>2,192,020,460</b>	<b>100</b>	<b>74.14</b>	<b>24</b>	<b>2,192,020,460</b>	<b>100</b>	<b>98.16</b>	<b>Dinas Sosial</b>
1.06.01.2	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	Orang	18	2,233,100,571			18	2,956,619,032	18	607,764,769	18	1,433,797,790	18	2,192,020,460	18	2,924,671,438	18	2,192,020,460	100	74.14	18	2,192,020,460	100	98.16	Dinas Sosial
<b>1.06.01.2</b>	<b>.03</b>	<b>Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>24</b>	<b>95,000,000</b>	<b>12</b>	<b>26,509,000</b>	<b>12</b>	<b>35,965,000</b>	<b>3</b>	<b>6,630,000</b>	<b>6</b>	<b>19,427,000</b>	<b>9</b>	<b>25,998,000</b>	<b>12</b>	<b>35,896,000</b>	<b>12</b>	<b>35,896,000</b>	<b>100</b>	<b>99.81</b>	<b>24</b>	<b>62,405,000</b>	<b>100</b>	<b>65.69</b>	<b>Dinas Sosial</b>
1.06.01.2	03.07	Pemanfaatan barang milik daerah	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	24	95,000,000	12	26,509,000	12	35,965,000	3	6,630,000	6	19,427,000	9	25,998,000	12	35,896,000	12	35,896,000	100	99.81	24	62,405,000	100	65.69	Dinas Sosial
<b>1.06.01.2</b>	<b>.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>24</b>	<b>488,000,000</b>	<b>12</b>	<b>430,534,600</b>	<b>12</b>	<b>228,966,750</b>	<b>3</b>	<b>21,445,600</b>	<b>6</b>	<b>74,972,000</b>	<b>9</b>	<b>124,291,500</b>	<b>12</b>	<b>214,785,900</b>	<b>12</b>	<b>214,785,900</b>	<b>100</b>	<b>93.81</b>	<b>24</b>	<b>645,320,500</b>	<b>100</b>	<b>132.24</b>	<b>Dinas Sosial</b>
1.06.01.2	06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	24	16,000,000	12	7,895,000	12	13,000,000	3	1,265,000	6	3,783,000	9	5,711,000	12	12,563,000	12	12,563,000	100	96.64	24	20,458,000	100	127.8625	Dinas Sosial
1.06.01.2	06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	24	50,000,000	12	6,676,000	12	10,800,000	3	2,684,000	6	3,740,000	9	5,984,000	12	8,272,000	12	8,272,000	100	76.59	24	14,948,000	100	29.896	Dinas Sosial
1.06.01.2	06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	24	45,000,000	12	30,403,000	12	32,966,400	3	4,788,600	6	12,470,600	9	17,740,600	12	25,960,300	12	25,960,300	100	78.75	24	56,363,300	100	125.25	Dinas Sosial
1.06.01.2	06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	24	24,000,000	12	5,040,000	12	12,000,000	3	-	6	6,750,000	9	9,450,000	12	9,450,000	12	9,450,000	100	78.75	24	14,490,000	100	60.375	Dinas Sosial
1.06.01.2	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi perjabanan dinas keluar dan dalam daerah	Ok	71	353,000,000	153	380,520,600	51	160,200,350	12	12,708,000	31	48,228,400	47	85,405,900	104	158,540,600	104	158,540,600	204	98.96	257	539,061,200	361.97	152.71	Dinas Sosial

1.06.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	24	366,000,000	12	228,827,302	12	246,950,674	3	53,158,740	6	111,962,288	9	165,560,288	12	240,441,878	12	240,441,878	100	97.36	24	469,269,180	100	128.22	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	Bulan	24	16,000,000	12	7,280,000	12	8,000,000	3	1,368,000	6	3,708,000	9	4,956,000	12	7,956,000	12	7,956,000	100	99.45	24	15,236,000	100	95.225	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga Honorier/PTT	Orang	15	350,000,000	9	221,547,302	9	238,950,674	9	51,790,740	9	108,254,288	9	160,604,288	9	232,485,878	9	232,485,878	100	97.29	9	454,033,180	60	129.72	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	Persen	70	42,000,000	61.41	26,545,042	70	30,200,000	61.41	4,595,500	61.41	11,138,400	61.41	20,955,550	61.41	28,884,300	61.41	28,884,300	88	95.64	61.41	55,429,342	87.72857	131.97	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perantara kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	Unit	2	30,000,000	2	21,645,042	2	24,200,000	2	3,445,500	2	8,588,400	2	17,205,550	2	23,034,300	2	23,034,300	100	95.18	2	44,679,342	100	148.93	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	24	12,000,000	12	4,900,000	12	6,000,000	3	1,150,000	6	2,550,000	9	3,750,000	12	5,850,000	12	5,850,000	100	97.50	24	10,750,000	100	89.58	Dinas Sosial	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rahabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas diluar panti	Persen	26	220,000,000			26	81,758,860	2.9	1,135,000	14.53	53,089,368	20.34	71,823,968	26	74,733,968	26.00	74,733,968	100	91.41	26.0	74,733,968	100	33.97	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarant, anak terlarant, lanjut usia terlarant, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Persentase rahabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas diluar panti	Persen	26	220,000,000			26	81,758,860	2.9	1,135,000	14.53	53,089,368	20.34	71,823,968	26	74,733,968	26.00	74,733,968	100	91.41	26.0	74,733,968	100	33.97	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.06	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlarant, lanjut usia terlarant, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah keluarga yang mendapatkan bimbingan	Keluarga	100	220,000,000			180	81,758,860	20	1,135,000	120	53,089,368	160	71,823,968	180	74,733,968	180	74,733,968	100	91.41	180	74,733,968	180	33.97	Dinas Sosial	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	50	1,999,400,000			50	1,804,096,460	42.45	37,568,000	84.89	1,180,390,400	59.99	1,185,031,200	50.95	1,780,088,700	50.95	1,780,088,700	102	98.67	51	1,780,088,700	101.9	89.03	Dinas Sosial	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	50	1,999,400,000			50	1,804,096,460	42.45	37,568,000	84.89	1,180,390,400	59.99	1,185,031,200	50.95	1,780,088,700	50.95	1,780,088,700	102	98.67	51	1,780,088,700	101.9	89.03	Dinas Sosial	
1.06.05.2.02.01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah rumah tangga dalam DTKS	Rumah Tangga	5662	450,000,000	5662	195,879,870	5662	254,696,460	5662	37,568,000	5662	150,763,600	5662	155,404,400	5662	235,279,900	5,662	235,279,900	100	92.38	5662	431,159,770	100	95.81	Dinas Sosial	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bantuan sosial	KK	833	1,549,400,000			833	1,549,400,000	0	-	830	1,029,626,800	827	1,029,626,800	827	1,544,808,800	827	1,544,808,800	99	99.70	827	1,544,808,800	99.279712	99.703679	Dinas Sosial	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	350,000,000			100	49,106,530		-	100	13,619,000	100	18,397,400	100	42,111,395	100	42,111,395	100	85.76	100	42,111,395	100	12.03183	Dinas Sosial	
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	350,000,000			100	49,106,530		-	100	13,619,000	100	18,397,400	100	42,111,395	100	42,111,395	100	85.76	100.00	42,111,395	100	12.031827	Dinas Sosial	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Persentase perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	Persen	100	350,000,000			100	49,106,530		-	100	13,619,000	100	18,397,400	100	42,111,395	100	42,111,395	100	85.76	100.00	42,111,395	100	12.031827	Dinas Sosial	
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna*):																											



1.06.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan pemerintahan	Persentase	80	1,189,000,000			80	239,000,000	80	230,382,406	80	50,156,921	80	102,734,914	80	161,234,202	80	216,008,814	80	216,008,814	100	93.76	80	216,008,814	100	18.17	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,155,000,000			12	231,000,000	12	202,004,000	3	48,536,921	6	94,614,612	9	146,928,611	12	194,387,684	12	194,387,684	100	96.23	12	194,387,684	100	16.83	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peroran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorannya	Unit	2	121,000,000			2	24,200,000	2	28,804,232	2	3,831,500	2	8,367,784	2	15,426,548	2	22,768,131	2	22,768,131	100	79.04	2	22,768,131	100	18.82	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	206,000,000			4	6,000,000	4	6,000,000	3	600,000	3	1,900,000	3	4,800,000	3	5,950,000	3	5,950,000	75	99.17	3	5,950,000	10	2.89	Dinas Sosial	
1.06.02.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persentase	50	800,000,000			40	200,000,000	40	132,978,661	0	499,000	40	4,232,012	40	7,031,771	40	90,159,671	40	90,159,671	100	67.80	40	90,159,671	80	11.27	Dinas Sosial	
1.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Orang	50	550,000,000			40	150,000,000	30	108,905,901	0	0	0	3,733,012	0	6,532,771	30	87,940,671	30	87,940,671	100.0	80.75	30	87,940,671	60	15.99	Dinas Sosial	
1.06.02.2.03.05.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang di Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	1	250,000,000			1	50,000,000	1	24,072,760	0	499,000	0	499,000	0	499,000	0	2,219,000	0	2,219,000	0	9.22	0	2,219,000	0	0.89	Dinas Sosial	
1.06.04.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG di Luar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya	Persentase	100	2,201,000,000			100	480,000,000	100	577,109,878	100	84,560,000	100	178,066,486	100	306,918,736	100	552,678,336	100	552,678,336	100	95.77	100	552,678,336	100	25.11	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	550,000,000			156	150,000,000	21	175,580,878	0	0	5	91,615,486	5	108,467,736	21	163,897,936	21	163,897,936	100	93.35	21	163,897,936	70	29.80	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG yang mendapatkan Bimbingan Mental dan Sosial sesuai Standar	Peserta	50	590,000,000				150,000,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Peserta	90	496,000,000			90	80,000,000	90	389,741,000	0	84,560,000	0	86,451,000	0	198,451,000	137	388,780,400	137	388,780,400	152.22	99.75	137	388,780,400	152	78.38	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	36	565,000,000			4	100,000,000	4	11,788,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) yang direhabilitasi	Persentase	100	470,968,000			36	75,000,000									0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0.00	Dinas Sosial	
1.06.04.2.02.08.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Bimbingan Sosial yang dilaksanakan kepada Keluarga PKMS dan Masyarakat	Peserta	50	470,968,000			50	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0.00	Dinas Sosial

1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persentase	59.74	1,659,852,000	-	60.49	608,284,000	60.49	2,832,869,000	94.70	34,213,000	88.34	70,700,300	74.37	110,281,800	89.25	2,032,435,400	89.25	2,032,435,400	147.55	71.74	89	2,032,435,400	149	122.45	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.	Pengembangan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Persentase	84.41	1,659,852,000	-	59.74	608,284,000	59.74	2,832,869,000	54.55	34,213,000	54.55	70,700,300	54.55	110,281,800	54.55	2,032,435,400	54.55	2,032,435,400	91.31	71.74	55	2,032,435,400	65	122.45	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga slem DTKS	Jumlah Fakir Miskin	30546	654,852,000	-	5,662	158,284,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.02.	Pengembangan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data PMSK yang dikelola	Jumlah Keluarga	2675	400,000,000	-	1	100,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	KPM	2675	605,000,000	-	833	350,000,000	10000	2,832,869,000	34,213,000	70,700,300	110,281,800	9,641	2,032,435,400	9,641	2,032,435,400	96.41	71.74	9,641	2,032,435,400	360	335.94	Dinas Sosial			
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	1,100,000,000	-	100	200,000,000	100	86,023,046	100	12,900,000	100	42,514,458	100	50,498,245	100	63,344,961	100	63,344,961	100	73.64	100	63,344,961	100	5.76	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase	100	1,100,000,000	-	100	200,000,000	100	86,023,046	100	12,900,000	100	42,514,458	100	50,498,245	100	63,344,961	100	63,344,961	100	73.64	100	63,344,961	100	5.76	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.01.	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pergugutan) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	250,000,000	-	0	50,000,000	0	86,023,046	1	12,900,000	1	42,514,458	1	50,498,245	3,116	63,344,961	3,116	63,344,961	#DIV/0!	73.64	3,116	63,344,961	#DIV/0!	25.34	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.02.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakain dan Kebanyakan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pergugutan) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	250,000,000	-	100	50,000,000	100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0.00	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.04.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Kelompok Rentan yang tertangani	Persentase	0	350,000,000	-	100	50,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0.00	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.05.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Pelayanan Dukungan Psikososial yang diberikan kepada Korban Bencana Alam dan Sosial Pasca Kejadian	Korban	0	250,000,000	-	100	50,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0.00	Dinas Sosial
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kampung	1	725,000,000	-	175,000,000	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.06.2.02.01.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB)	Kampung	1	325,000,000	-	1	75,000,000	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.06.2.02.02.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang mengikuti Sosialisasi	Orang	17	400,000,000	-	14	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Persentase	100	310,000,000	-	100	50,000,000	100	18,075,000	100	3,000,000	100	6,930,504	100	12,532,632	100	17,520,136	100	17,520,136	100	96.93	100	17,520,136	100	5.65	Dinas Sosial
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Persentase	100	310,000,000	-	100	50,000,000	100	18,075,000	100	3,000,000	100	6,930,504	100	12,532,632	100	17,520,136	100	17,520,136	100	96.93	100	17,520,136	100	5.65	Dinas Sosial
1.06.07.2.01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	11	310,000,000	-	11	50,000,000	11	18,075,000	11	3,000,000	11	6,930,504	11	12,532,632	11	17,520,136	11	17,520,136	100	96.93	11	17,520,136	100	5.65	Dinas Sosial

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Dinas Sosial pada tahun 2021 dan 2022 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 5 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2021 dan 6 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2022, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan sosial tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2020/2021)	Target Kinerja Akhir Renstra (2026)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022		
					Target Kinerja Renja tahun 2021	Realisasi Kinerja Renja tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2022	Realisasi Kinerja Renja tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.28	80.05	76	78.28	103	78.80	80.61	102.30
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persen	80	90	80	80	100	80	80	100
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50	50	50	50	100	40	40	100
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng diluar panti sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persen	50.95	59.74	50	50.95	101.90	60.49	89.25	147.55
Program Penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
  - Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani
  - Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial di daerah dan nasional
  - Banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah
  - Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan
  - Belum optimalnya pemberdayaan PSKS.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
  - Adanya perubahan kebijakan dari tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah
  - Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah
  - Kurangnya SDM dan personil yang menangani permasalahan sosial secara khusus

c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- Adanya dukungan Program dan Anggaran baik dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong program percepatan pengentasan kemiskinan di daerah khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.
- Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan sosial
- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dasar

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung PPKS

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2022, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020–2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005–2025. RPJMN 2020–2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2020–2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ;

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry,

kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa;

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Memajukan kebudayaan;
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan
- 5) Meningkatkan budaya literasi

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien dan
- 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup,

serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2023, antara lain meliputi:

- a. Kemiskinan;
- b. Lapangan Kerja;
- c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. Industri;

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada pengembangan kawasan industri prioritas dan *smelter*, pengelolaan terpadu UMKM, *food estate*, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi

pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen;
3. Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen;
4. Rasio Gini 0,375–0,378;
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen;
7. Nilai Tukar Petani 103–105;
8. Nilai Tukar Nelayan 106–107.

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu:

- (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
- (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*;
- (4) mendorong pemulihan dunia usaha;
- (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
- (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya”**.

Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2023 mempunyai prioritas yaitu:

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah, diantaranya, peningkatan PDRB sektor konstruksi, industri pengolahan dan sektor perdagangan. Kemudian, peningkatan pemanfaatan sektor pertanian dan peningkatan PAD
  2. Pembangunan infrastruktur wilayah. Diantaranya, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan antar pulau dan pesisir
  3. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya. Diantaranya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, manajemen ASN yang profesional, mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta harmonisasi antar umat dan beragama
- Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2023 sehingga penyesuaian prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Infrastruktur dan Percepatan Peningkatan Ekonomi”**.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam urusan bidang sosial yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan

dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Sosial merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang

digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Misi 2 : Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
<b>Misi 6 : Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2023**  
**Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran 2023	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2023
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	51,04	Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50
					Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Diluar Panti Sosial	Persen	100
					Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persen	59,84
					Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya	Persen	100
					Pengelolaa Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlwan yang Dikelola	Persen	100

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Indikator Sasaran 2023</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Kinerja Program Tahun 2023</b>
Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	79,00	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79,00
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,47	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Nilai	85

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada Urusan Sosial yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024).

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
KABUPATEN NATUN**

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5,847,629,300	6,539,829,400	
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								5,847,629,300	6,539,829,400	
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		NILAI LAPORAN LKJIP	79.00 Nilai			58,210,000	58,210,000	
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	58,210,000	58,210,000	
1.06.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	58,210,000	58,210,000	
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Tahunan SKPD			Kabupaten Natuna				2 Laporan	58,210,000	58,210,000	
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85 Persen			4,383,451,400	4,398,451,400	
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,039,820,000	3,039,820,000	
1.06.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	3,039,820,000	3,039,820,000	
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Natuna				19 Orang/bulan	3,039,820,000	3,039,820,000	
1.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase aparatur yang	11 Persen	30,000,000	45,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	30,000,000	45,000,000	
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kabupaten Natuna				2 Orang	30,000,000	45,000,000	
1.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	16,200,000	16,200,000	
1.06.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	16,200,000	16,200,000	
	Belanja Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Kabupaten Natuna				27 Paket	16,200,000	16,200,000	
1.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75 Persen	477,231,400	477,231,400	
1.06.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	48,000,000	48,000,000	
	Belanja Alat Tulis Kantor, alat dan bahan kebersihan			Kabupaten Natuna				1 Paket	48,000,000	48,000,000	
1.06.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	25,000,000	
	Belanja Peralatan Rumah Tangga (Piring, Gelas, Sendok, Tisu, Gayung, Keset Kaki dan Lainnya)			Kabupaten Natuna				1 Paket	25,000,000	25,000,000	
1.06.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,000,000	12,000,000	
	Belanja Bahan-Bahan (Gula, Beras, Kopi, Teh dan Lainnya)			Kabupaten Natuna				1 Paket	12,000,000	12,000,000	
1.06.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	32,966,400	32,966,400	
	Belanja Spanduk, Belanja Penggandaan dan Belanja Cetak			Kabupaten Natuna				3 Paket	32,966,400	32,966,400	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12,000,000	12,000,000	
	Belanja Surat Kabar/Majalah			Kabupaten Natuna				1 Dokumen	12,000,000	12,000,000	
1.06.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	10,000,000	
	Penyediaan Obat dan lainnya			Kabupaten Natuna				1 Paket	10,000,000	10,000,000	
1.06.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	307,265,000	307,265,000	
	Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Makan Minum Rapat Rutin			Kabupaten Natuna				28 Laporan	307,265,000	307,265,000	
1.06.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	30,000,000	30,000,000	
	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kabupaten Natuna				6 Dokumen	30,000,000	30,000,000	
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55 Persen	450,000,000	450,000,000	
1.06.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	75,000,000	75,000,000	
	Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua			Kabupaten Natuna				3 Unit	75,000,000	75,000,000	
1.06.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34 Unit	150,000,000	150,000,000	
	Belanja Modal Lemari Kayu 2 Pintu			Kabupaten Natuna				4 Unit	20,000,000	20,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet			Kabupaten Natuna				4 Unit	20,000,000	20,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja			Kabupaten Natuna				10 Unit	30,000,000	30,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu			Kabupaten Natuna				4 Unit	20,000,000	20,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Lemari Kayu 4 Pintu			Kabupaten Natuna				5 Unit	35,000,000	35,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja			Kabupaten Natuna				6 Unit	24,000,000	24,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring			Kabupaten Natuna				1 Unit	1,000,000	1,000,000	
1.06.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	175,000,000	175,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Mouse Bluetooth			Kabupaten Natuna				5 Unit	2,500,000	2,500,000	
	Belanja Modal Pengadaan Alat Penghancur Kertas			Kabupaten Natuna				4 Unit	8,000,000	8,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Kalkulator			Kabupaten Natuna				5 Unit	2,500,000	2,500,000	
	Belanja Modal Pengadaan Keyboard Komputer PC			Kabupaten Natuna				1 Unit	600,000	600,000	
	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC			Kabupaten Natuna				3 Unit	51,000,000	51,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Kulkas			Kabupaten Natuna				2 Unit	10,000,000	10,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Scan Dokumen			Kabupaten Natuna				3 Unit	21,000,000	21,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Parabola/Reciver			Kabupaten Natuna				2 Unit	4,400,000	4,400,000	
	Belanja Modal Pengadaan Printer			Kabupaten Natuna				4 Unit	22,000,000	22,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan TV LED			Kabupaten Natuna				2 Unit	14,000,000	14,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan UPS			Kabupaten Natuna				5 Unit	14,000,000	14,000,000	
	Penyedia Peralatan Zoom			Kabupaten Natuna				1 Unit	25,000,000	25,000,000	
1.06.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50,000,000	50,000,000	
	Belanja Pengadaan Umbul-umbul			Kabupaten Natuna				50 Unit	50,000,000	50,000,000	
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	66 Persen	241,000,000	239,000,000	
1.06.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8,000,000	6,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Belanja Materai			Kabupaten Natuna				1 Laporan	8,000,000	6,000,000	
1.06.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	
	Belanja Pembayaran Air			Kabupaten Natuna				1 Laporan	1,000,000	1,000,000	
	Belanja Pembayaran Air			Kabupaten Natuna				1 Laporan	1,000,000	1,000,000	
1.06.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	231,000,000	231,000,000	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji PTT)			Kabupaten Natuna				12 Laporan	231,000,000	231,000,000	
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75 Persen	129,200,000	131,200,000	
1.06.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	23,200,000	25,200,000	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan dan Pembayaran Pajak/Perizinan			Kabupaten Natuna				2 Unit	23,200,000	25,200,000	
1.06.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6,000,000	6,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Natuna				5 Unit	6,000,000	6,000,000	
1.06.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	50,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Natuna				1 Unit	50,000,000	50,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	50,000,000	50,000,000	
	Pemeliharaan Tempat dan Halaman Kantor (Rehab WC, Ruangan dan lainnya)			Kabupaten Natuna				5 Unit	50,000,000	50,000,000	
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL	50 Persen			230,000,000	484,884,000	
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah PSKS yang dikembangkan	6 PSKS	230,000,000	484,884,000	
1.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	50,000,000	150,000,000	
	Pembinaan dan Sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat			Kabupaten Natuna				40 Orang	50,000,000	150,000,000	
1.06.02.2.03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	80,000,000	234,884,000	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)			Kabupaten Natuna				16 Orang	80,000,000	234,884,000	
1.06.02.2.03.04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	50,000,000	50,000,000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)			Kabupaten Natuna				2 Lembaga	50,000,000	50,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.02.2.03.05.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	50,000,000	50,000,000	
	Pelaksanaan Sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			Kabupaten Natuna				1 Sertifikat	50,000,000	50,000,000	
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GEPENG DILUAR PANTI SOSIAL	100 Persen			395,000,000	510,000,000	
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya	100 Persen	395,000,000	510,000,000	
1.06.04.2.01.01.	Penyediaan Permakanan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	50,000,000	
	Penyediaan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti			Kabupaten Natuna				10 Orang	50,000,000	50,000,000	
1.06.04.2.01.02.	Penyediaan Sandang						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30,000,000	30,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti			Kabupaten Natuna				10 Orang	30,000,000	30,000,000	
1.06.04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50,000,000	150,000,000	
	Pemberian Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti			Kabupaten Natuna				30 Orang	50,000,000	150,000,000	
1.06.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	50,000,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti			Kabupaten Natuna				50 Orang	50,000,000	50,000,000	
1.06.04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	80,000,000	80,000,000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			Kabupaten Natuna				90 Orang	80,000,000	80,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.04.2.01.11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	85,000,000	100,000,000	
	Belanja Transportasi/Pemulangan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti			Kabupaten Natuna				5 Orang	85,000,000	100,000,000	
1.06.04.2.01.12.	Pemberian Layanan Rujukan						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	50,000,000	50,000,000	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)			Kabupaten Natuna				5 Orang	50,000,000	50,000,000	
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	100 Persen			125,967,900	125,000,000	
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang direhabilitasi	100 Persen	125,967,900	125,000,000	
1.06.04.2.02.01.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	50,000,000	50,000,000	
	Pemberian Pelayanan Data dan Pengaduan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Kabupaten Natuna				20 Orang	50,000,000	50,000,000	
1.06.04.2.02.08.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75,967,900	75,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Natuna				50 Orang	75,967,900	75,000,000	
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PPKS	60.09 Persen			275,000,000	508,284,000	
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	64.93 Persen	275,000,000	508,284,000	
1.06.05.2.02.01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31479 Orang	90,000,000	158,284,000	
	Musdes, Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)			Kabupaten Natuna				31479 Orang	90,000,000	158,284,000	
1.06.05.2.02.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2675 Keluarga	50,000,000	100,000,000	
	Bantuan Sosial Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			Kabupaten Natuna				2675 Keluarga	50,000,000	100,000,000	
1.06.05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2675 Keluarga	85,000,000	150,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			Kabupaten Natuna				2675 Keluarga	85,000,000	150,000,000	
1.06.05.2.02.04.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	100,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan dan Pemberian Bantuan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP)			Kabupaten Natuna				50 Orang	50,000,000	100,000,000	
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	100 Persen			300,000,000	375,000,000	
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100 Persen	200,000,000	200,000,000	
1.06.06.2.01.01.	Penyediaan Makanan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	50,000,000	
	Pemberian Permakanan 3x1 Hari bagi Korban Bencana Alam dan Sosial			Kabupaten Natuna				10 Orang	50,000,000	50,000,000	
1.06.06.2.01.02.	Penyediaan Sandang						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	50,000,000	
	Pemberian Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Korban Bencana Alam dan Sosial			Kabupaten Natuna				10 Orang	50,000,000	50,000,000	
1.06.06.2.01.04.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	50,000,000	
	Pemberian Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Korban Bencana			Kabupaten Natuna				10 Orang	50,000,000	50,000,000	
1.06.06.2.01.05.	Pelayanan Dukungan Psikososial						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	50,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNA N	LOKASI	INDIKATOR				PAGU INDIKATI F	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberian Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana			Kabupaten Natuna				10 Orang	50,000,000	50,000,000	
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Kampung Siaga Bencana	1 Desa	100,000,000	175,000,000	
1.06.06.2.02.01.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kabupaten/Kota	1 Kampung	50,000,000	75,000,000	
	Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Natuna				1 Kampung	50,000,000	75,000,000	
1.06.06.2.02.02.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	50,000,000	100,000,000	
	Pelaksanaan Sosialisasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kewenangan			Kabupaten Natuna				17 Orang	50,000,000	100,000,000	
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DIKELOLA	100 Persen			80,000,000	80,000,000	
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Tam an Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100 Persen	80,000,000	80,000,000	
1.06.07.2.01.01.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional			Kecamatan Bunguran Timur				1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.07.2.01.02.	Pemeliharaan Tam an Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11 Makam	40,000,000	40,000,000	
	Pemeliharaan Makam pada Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			Kabupaten Natuna				11 Makam	40,000,000	40,000,000	
JUMLAH									<b>5,847,629,300</b>	<b>6,539,829,400</b>	

Ranai, 23 Agustus 2022

Kepala Dinas Sosial

PURYANTI, SP

NIP. 19750706 200003 2 008

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan sosial yang bermanfaat guna mendukung pencapaian Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pejabat struktural di Dinas Sosial agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2023 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2023 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2023.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja tahun 2023 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Sosial Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan sosial diharapkan akan lebih

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan sosial. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2023 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.